

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Rendahnya Investasi Daerah merupakan Permasalahan Penanaman Modal di Kabupaten Pati. Beberapa faktor penyebabnya antara lain Rendahnya prosentase Pertumbuhan Investasi, Masih ditemukannya Ketidak sesuaian perizinan, rendahnya promosi Investasi, rendahnya pengawasan investasi, dan rendahnya efektifitas perencanaan Penanaman Modal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258 menyebutkan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Visi bupati-wakil bupati terpilih Tahun 2017-2022, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah “ MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK” dari Visi tersebut memiliki beberapa Misi antara lain Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri yang merupakan misi ke 4 dan ke 6.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030. RTRW merupakan landasan umum dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi salah satu dasar perencanaan pembangunan di Kabupaten Pati yang secara rinci dituangkan dalam indikasi program.

Sebagai peraturan daerah dan landasan operasional pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya proses perizinan diperlukan rencana tata ruang yang bersifat lebih rinci yaitu rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut langkah yang ditempuh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal.
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan OPD secara dinamis.
- 3.. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah.
4. Peningkatan sistem dan inovasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
5. Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi.
6. Meningkatkan sarana prasarana gedung kantor.

3.4 Penentuan Isu - isu Strategis

Mengacu Isu Strategis Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
Review Telaahan Visi Misi Kepala Daerah, Kementerian Lembaga,
Perangkat Daerah Provinsi Dan RTRW-KLHS

Tabel 3.1

Aspek yang di Review	Uraian	Isu-Isu
Jenis Pelayanan	Pelayanan Perizinan Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan kesesuaian perizinan Peningkatan Kondusivitas Usaha di daerah
Telaahan Visi Misi Kepala daerah	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Telaahan Terhadap BKPM RI	Pelayanan perizinan secara Elektronik (SPIPISE)	Peningkatan kualitas SDM yang menangani di bidangnya
Telaahan Terhadap DPMPTSP Prov	Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal
Telaahan Terhadap RTRW-KLHS	Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Peningkatan Iklim Investasi yang kondusif Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung iklim Investasi

Rendahnya nilai investasi di Kabupaten Pati, belum optimalnya pelayanan perizinan sesuai standar waktu dan biaya yang ditetapkan, kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap mekanisme perizinan investasi dan belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta kurang optimalnya pelayanan publik aparatur pemerintahan.

Permasalahan aktual yang berkembang dimasyarakat saat ini dan perlu penanganan segera serta direalisasikan dalam bentuk usulan program / kegiatan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.

Dalam hubungannya urusan penanaman modal dan pemerintahan umum meliputi :

Isu Penanaman Modal :

1. Belum Optimalnya pelayanan Perizinan sesuai standar waktu dan biaya ditetapkan.
2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Isu Pemerintahan Umum :

1. Kurang representatif posisi dan tata letak Dinas sebagai standar pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
2. Masih ada jenis layanan perizinan yang melekat di dinas teknis.
3. Masih adanya persyaratan perizinan dalam bentuk rekomendasi yang masih menjadi kewenangan Dinas teknis sehingga pemohon masih direpotkan pengurusannya.